

PENGANTAR

Pembangunan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan diharapkan pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang *pro-poor* (berpihak kepada kaum miskin). Namun upaya mewujudkan niat baik tersebut tidaklah mudah karena banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan perwujudan tujuan tersebut. Salah satu faktornya adalah proses perumusan kebijakan. Sangat jelas bahwa dalam tahapan ini, terdapat berbagai proses kompromi dan proses-proses politik. Tidak tertutup kemungkinan proses itu berakhir pada tidak tercapainya tujuan mulia dan hanya terhenti pada pemenuhan nafsu politik ekonomi penguasa. Kelemahan utama dalam perumusan kebijakan di Indonesia adalah masih belum jelasnya keberpihakan pemerintah kepada penduduk miskin. Melalui kajian tentang keberpihakan kebijakan anggaran bidang kesehatan, Harry mengungkapkan fakta bahwa para perencana anggaran berstrategi mengalokasikan belanja fisik yang berlebihan sebagai akibat adanya keinginan untuk memperoleh volume program yang lebih besar. Faktor penting lain adalah kurangnya sensitivitas pihak legislatif dalam mencermati RKPD SKPD. Pada satu sisi, terdapat kecenderungan alokasi anggaran yang lebih besar bagi DPRD dibandingkan dengan belanja langsung Dinas Kesehatan, khususnya untuk program-program pelayanan kesehatan dasar. Proses perumusan kebijakan anggaran merupakan proses perebutan sumber daya publik antar-*stakeholders* dalam pemerintahan.

Kajian Kainakaimu semakin menegaskan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan pada tataran puskesmas. Masih terdapat kendala internal berupa kurangnya kesadaran warga miskin untuk berperilaku sehat, kurangnya minat untuk berobat ke puskesmas, kurangnya kemanfaatan Askeskin, dan kurangnya partisipasi warga miskin dalam program kesehatan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kualitas tenaga kesehatan, kurangnya mutu pelayanan kesehatan, belum tepatnya penempatan tenaga kesehatan, serta minimnya berbagai informasi dan fasilitas kesehatan. Tulisan Sinaga, yang menyoroti pembangunan pendidikan dasar melalui data SAKERTI 2000 dan 2007, menunjukkan maraknya pekerja anak karena anak harus menopang perekonomian keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Fenomena pekerja anak ditemukan, baik pada keluarga miskin maupun kaya yang terjadi tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Dengan demikian, tampak bahwa pada saat ini, tekanan ekonomi dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Dampak yang muncul adalah pencapaian target APM dan angka putus sekolah masih jauh dari target, adanya penurunan nilai rerata UN, dan kurangnya efisiensi dana pendidikan. Tulisan Soewartoyo menunjukkan bahwa pada dasarnya harapan orang tua untuk menyekolahkan anak cukup tinggi, namun faktor eksternal cukup besar memengaruhi pencapaian harapan ini. Dalam kajiannya, Lilik mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi pengetahuan perempuan Indonesia terhadap HIV/AIDS adalah pendidikan. Dalam kajiannya, Sumini dan Jevri menjelaskan bahwa perilaku hidup sehat ibu dan kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi kualitas kesehatan anak balita di Indonesia. Di wilayah perdesaan, jumlah ibu yang tinggal dalam rumah tanpa dilengkapi sarana sanitasi yang memadai masih relatif banyak. Berangkat dari keenam tulisan dalam edisi ini, tampak bahwa upaya untuk menyejahterakan rakyat melalui program kesehatan dan pendidikan masih jauh dari harapan.

Pengelola